

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Bank Umum Syariah di Indonesia

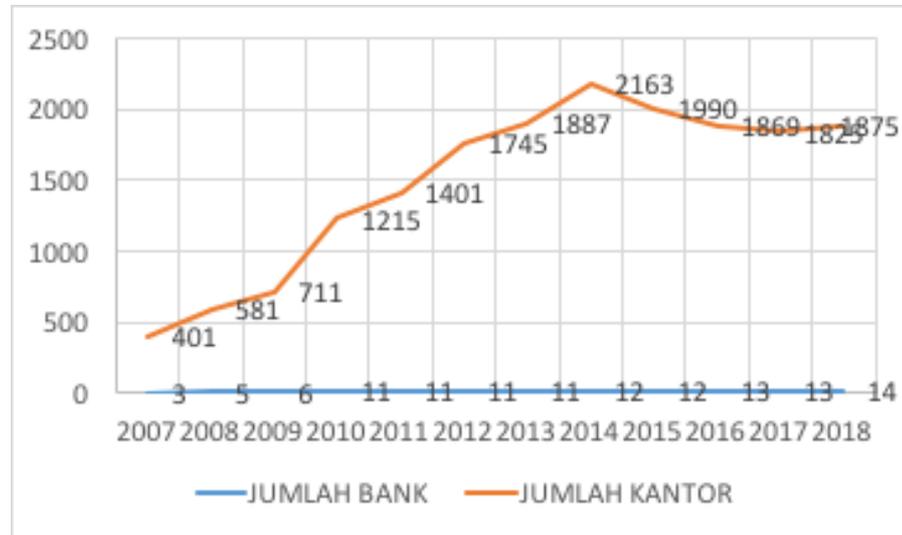
Dalam pengembangannya system perbankan syariah yang ada di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking, dimana system perbankan ganda dalam kerangka rsitektur Perbankan Indonesia (API). Untuk menghadirkan alternative dari jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Secara *simultan* atau Bersama-sama , system dari perbankan syariah dan perbankan konvensional sendiri secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian secara nasional.

Karakteristik dari sistem perbankan syariah sendiri yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank itu sendiri, serta dapat menonjolkan keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, maka perbankan syariah akan menjadi alternative dari sistem perbankan yang pastinya kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat yang ada di Indonesia tanpa terkecuali (OJK, 2017).

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam pekreditan yang itu merupakan sistem dari perbankan syariah, lalu pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan (Pakto 88) yang dimana isinya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bisnis perbankan dalam menunjang pembangunan, namun setelah keluarnya kebijakan tersebut, tetap lebih banyak bank konvensional yang berdiri. Tetapi beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai muncul. Akhirnya pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja dan mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai menyelenggarakan lokarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil tersebut kemudian dibahas lebih spesifik pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang intinya menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank islam di Indonesia, lalu mulai berdirilah banksyariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. Lalu mulai saat itu berkembanglah Bank Umum Syariah di Indonesia

Gambar 4.1

Perkembangan Bank Umum Syariah



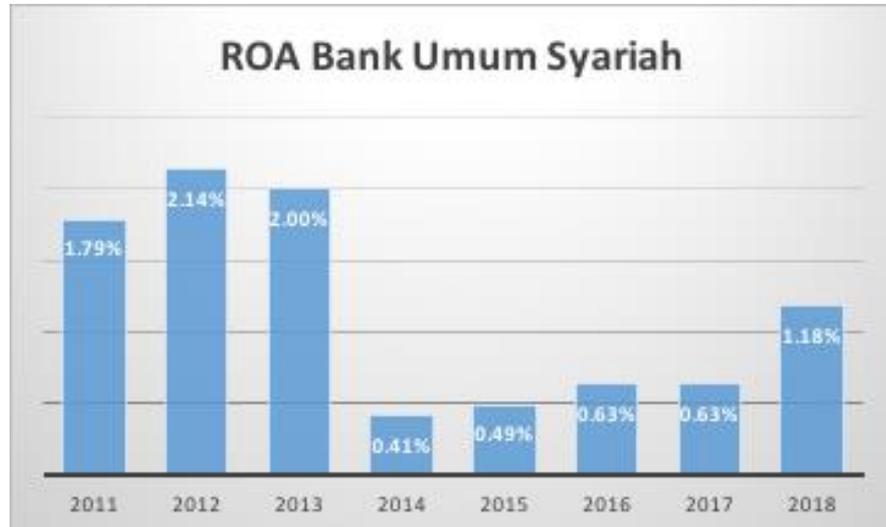
Sumber: Data Statistik OJK, 2018

Dari grafik 4.1 bisa dilihat bahwasannya perkembangan Bank Umum Syariah terlihat bagus dikarenakan adanya peningkatan jumlah bank yang berbasis syariah, terlihat hingga tahun 2018 jumlah bank syariah menjadi 14 bank. Sedangkan jumlah kantor dari Bank Umum Syariah secara menyeluruh juga dapat dikatakan bagus karena mengalami peningkatan hingga tahun 2014, dan mulai stabil sampai 2018.

B. Perkembangan *Return On Asset (ROA)* Bank Umum Syariah

ROA adalah salah satu alat ukur bagi perusahaan dalam kasus ini Bank Umum Syariah (BUS) untuk mengelola dan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Selain itu ROA juga dapat memberikan informasi seberapa efisien suatu perusahaan atau suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena dalam rasio ROA dapat mengindikasikan berapa besar keuntungan yang didapatkan.

Gambar 4.2
Perkembangan ROA Bank Umum Syariah



Sumber: Data Statistik OJK, 2018

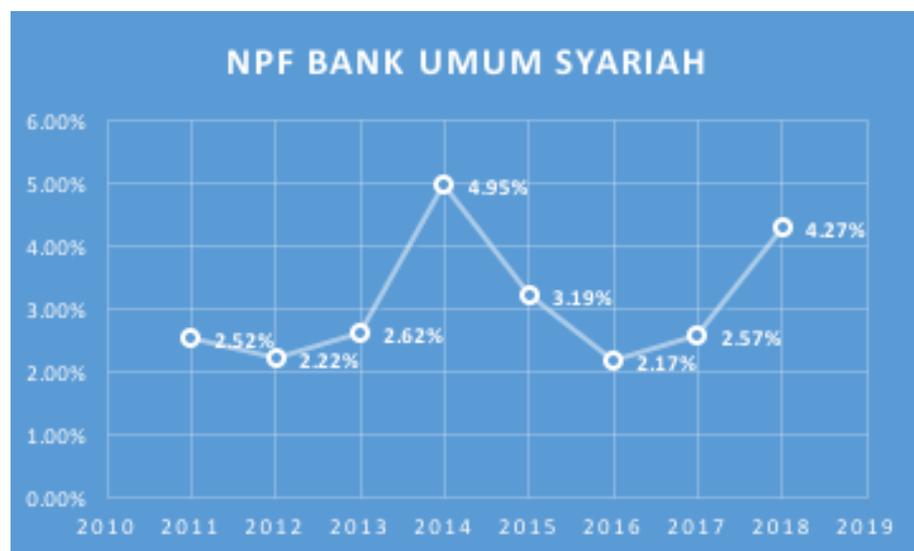
Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa presentase ROA Bank Umum Syariah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 – 2009 ROA Bank Umum Syariah mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Lalu pada tahun 2014 ROA bank Umum syariah menurun hingga 0.42% dimana ini merupakan titik terendah ROA Bank Umum Syariah pada 8 tahun terakhir ini, namun dari tahun ke tahun tingkat ROA terus meningkat hingga pada akhirnya di tahun 2018 dapat kembali membaik dengan ROA sebesar 1.18%. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa ROA Bank Umum Syariah masih dapat stabil dalam segi profitabilitasnya.

C. Perkembangan *Non Performing Finance* (NPF) Bank Umum Syariah

NPF biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan dari manajemen bank syariah dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan

oleh bank syariah. Resiko kredit yang telah diberikan oleh bank merupakan salah satu dari resiko usaha dalam bank, yang dapat diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur yang bersangkutan.

Gambar 4.3
Perkembangan NPF Bank Umum Syariah



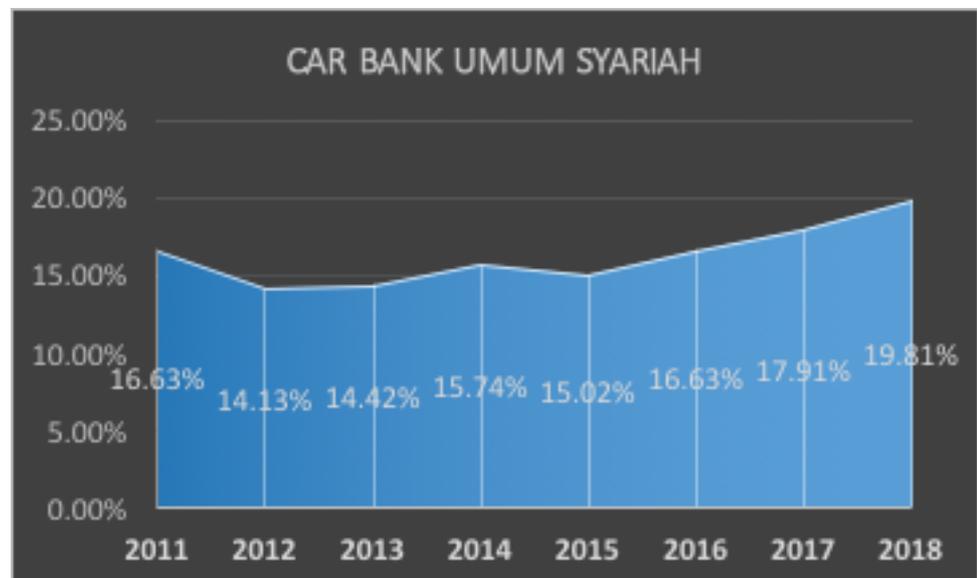
Sumber: Data Statistik OJK, 2018

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan NPF dalam 8 tahun terakhir ini terlihat fluktuatif. Secara *general* Bank Umum Syariah di Indonesia dapat mengelola NPF dengan cukup baik. Terbukti dari peningkatan NPF yang signifikan hanya pada tahun 2014 dan 2018. Dan pada tahun-tahun yang lain hanya berkisar pada angka 2% - 3% saja. Ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia dapat mengelola kredit macetnya dengan baik.

D. Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah

CAR adalah rasio dari permodalan yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank yang berdasarkan pada tingkat resiko bank. Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung ataupun menghasilkan resiko.

Gambar 4.4
Perkembangan CAR Bank Umum Syariah



Sumber: Data Statistik OJK, 2018

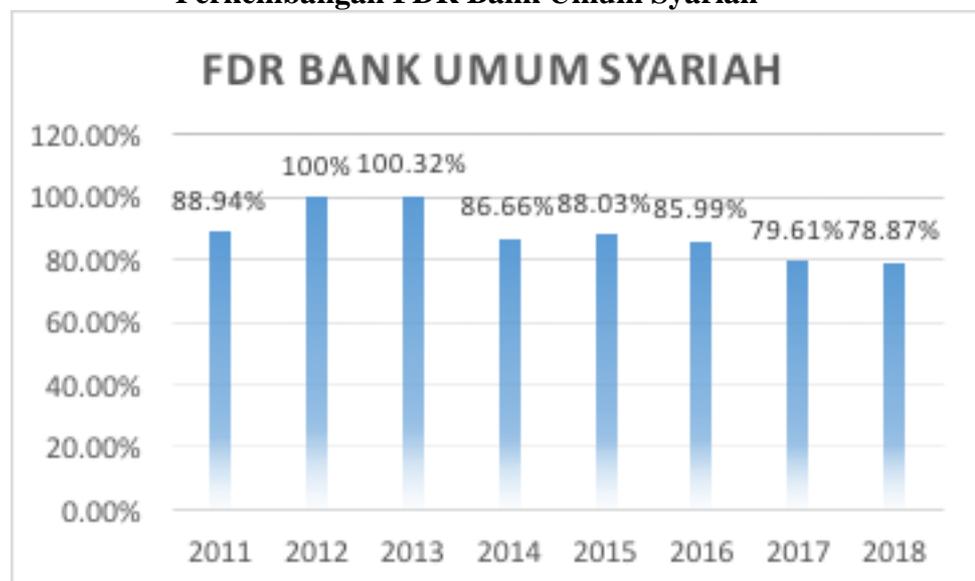
Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan CAR atau resiko oleh Bank Umum Syariah di Indonesia cukup baik, karena rasio CAR melebihi ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Dimana semakin tinggi nilai CAR maka membuktikan bahwa bank dapat mengelola resiko lebih baik, dan menandakan kecukupan modal yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah di Indonesia baik. Terbukti dari periode

2011 – 2018 nilai CAR tidak ada yang kurang dari 8% dan diatas 14% nilai rata-ratanya.

E. Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah

Dalam perbankan syariah, nilai FDR sendiri merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Rasio ini dapat menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang telah diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio FDR maka akan memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

Gambar 4.5
Perkembangan FDR Bank Umum Syariah



Sumber: Data Statistik OJK, 2018

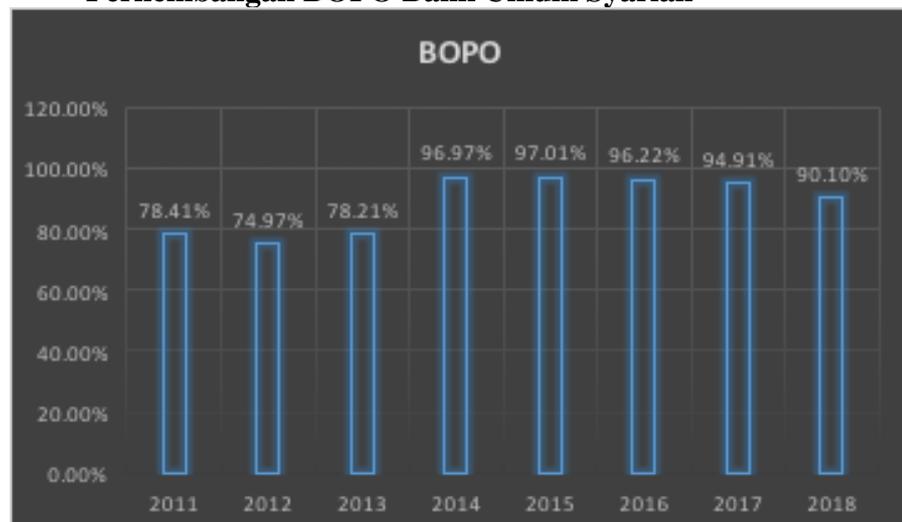
Dapat dijelaskan bahwa FDR pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011 sampai 2018 mengalami penurunan, dimana ini bagus dikarenakan semakin rendahnya nilai FDR maka menandakan bahwa bank

dapat mengelola likuiditasnya dengan baik. Kenaikan FDR yang lumayan signifikan hanya terjadi selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2012 sebesar 100% dan tahun 2013 sebesar 100.32%. Selanjutnya terus menurun hingga pada tahun 2018 menjadi 78.87%. dapat dikatakan bahwa kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia cukup baik.

F. Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio efisiensi yang digunakan guna untuk mengukur seberapa kemampuan manajemen suatu bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas (ROA). Dalam rasio ini bank harus teliti dalam pengelolaan biaya operasionalnya agar dapat memaksimalkan laba yang nantinya akan di dapatkan.

Gambar 4.6
Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah



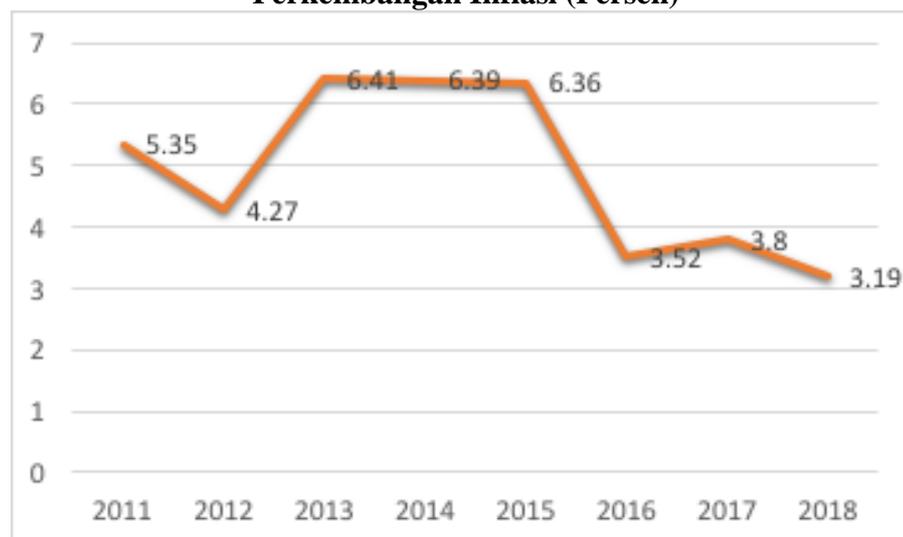
Sumber: Data Statistik OJK, 2018

Dalam Tabel tersebut dapat dilihat bahwa rasio BOPO tahun 2014 – 2018 cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 90%, dimana ini kurang baik untuk Bank Umum Syariah di Indonesia karena semakin tingginya rasio BOPO maka profitabilitas yang akan didapat oleh bank juga bisa menurun. Sebaliknya pada tahun 2011 – 2013 nilai dari rasio BOPO cukup kecil dengan rata-rata tidak lebih dari 80%, pada periode tersebut dapat dikatakan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia dapat mengelola tingkat BOPO dengan cukup baik.

G. Perkembangan Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan barang dan jasa yang terjadi dalam suatu negara secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu. Ketika tingkat inflasi meningkat maka akan mempengaruhi pola *saving* dan pembiayaan pada masyarakat.

Gambar 4.7
Perkembangan Inflasi (Persen)



Sumber: *World Bank*, 2018

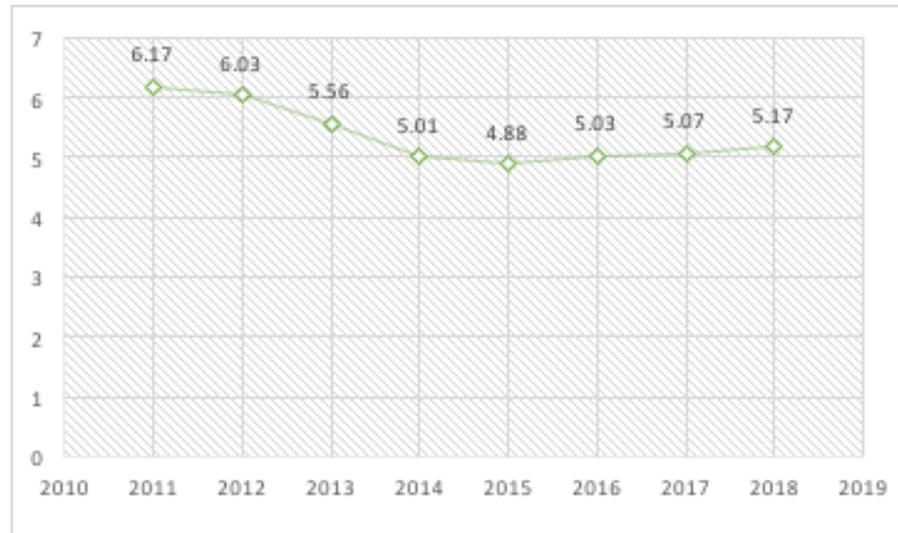
Dalam gambar 4.7 dapat diketahui tingkat Inflasi dari periode 2011 sampai 2018 mengalami fluktuatif. Peningkatan tertinggi Inflasi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 – 2015 menyentuh hingga 6%, hal ini menjadi tidak baik karena jika inflasi meningkat maka harga barang atau jasa juga ikut meningkat. Tetapi mulai tahun 2016 hingga 2018 sudah kembali membaik hingga menyentuh angka 3%.

H. Perkembangan *Growth Domestic Product* (GDP)

GDP merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada dasarnya GDP adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu negara. GDP atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku tiap tahunnya. Sedangkan GDP atas dasar harga konstan menggambarkan bahwa nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. GDP atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, lalu untuk harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2014).

Gambar 4.8

Perkembangan GDP (persen)



Sumber: *World Bank*, 2018

Tingkat GDP di Indonesia pada periode 2011 hingga 2018 dapat dilihat di gambar 4.8 mengalami penurunan. Pada awal di tahun 2011 tingkat GDP sebesar 6.17% dan terus mengalami penurunan hingga pada akhirnya di tahun 2018 tingkat GDP menjadi 5.17%. hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia tingkat GDP masih cenderung belum terkelola dengan begitu baik.

I. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika

Nilai tukar atau biasa disebut Kurs merupakan harga mata uang domestik dalam mataa uang asing. Dalam perjalanannya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amarika terus mengalami peningkatan, tentu hal ini perlu dikendalikan kembali dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter dan mendorong sektor-sektor makroekonomi agar nilai dollar tidak semakin meningkat.

Tabel 4.1

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika

Tahun	Kurs
2011	9068
2012	9670
2013	12189
2014	12440
2015	13795
2016	13436
2017	13548
2018	14710

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Dalam tabel 4.1 menunjukkan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika periode 2011 – 2018. Bisa dijelaskan bahwa nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika dari tahun ke tahun terus menurun, pada tahun 2011 Rupiah terhadap Dollar Amerika masih berada pada Rp. 9.068,00 dan dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada tahun 2018 mencapai Rp. 14.710,00. Hal ini tentunya perlu perhatian khusus dari Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengatur Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika agar bisa lebih stabil.